

**REKAPITULASI HASIL TEMUAN BPK-RI ATAS LKPD DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 S.D. 2021 (ADMINISTRASI)
YANG BELUM DITINDAKLANJUTI DAN BELUM SESUAI REKOMENDASI PER TANGGAL 16 JUNI 2022**

| No. | Jenis Pemeriksaan | Temuan | SKPD | Status Tindak Lanjut | Rekomendasi | Penyebab / Alasan Belum Sesuai | Keterangan |
|-----|-------------------|--|----------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 1. | LKPD Tahun 2013 | | Dispenda/ Bapenda | BS | Memerintahkan Kepala SKPD sebagai Pengguna Barang untuk menginventarisasi rumah dinas yang disewa pegawai dan memperbaharui SIP yang sudah kadaluarsa dengan berkoordinasi kepada Biro Perlengkapan dan melakukan pemotongan gaji langsung kepada pegawai yang menyewa rumah dinas dan berkoordinasi kepada UPTD Dispenda sebagai laporan pendapatan retribusi sewa rumah dinas | Belum ada koordinasi dan inventarisasi rumah dinas yang disewa pegawai dan memperbaharui SIP yang sudah kadaluarsa dengan berkoordinasi kepada Biro Perlengkapan; Belum ada bukti bahwa pemotongan gaji langsung kepada pegawai yang menyewa rumah dinas dan belum ada berkoordinasi kepada UPTD Dispenda sebagai laporan pendapatan retribusi sewa rumah dinas | Sudah ditindaklanjuti dengan memperbarui SIP |
| 2. | LKPD Tahun 2017 | Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya | Bapenda | BS | BPK merekomendasikan OPD yang menangani pengelolaan tagihan penjualan angsuran kurang cermat dalam mengelolanya terutama melengkapi surat perjanjian penjelasan angsuran yang menjelaskan hak dan kewajiban dalam perjanjian dan melakukan upaya penyelesaian tunggakan sesuai perjanjian (misal menarik kembali aset daerah jika terdapat tunggakan atau penagihan denda atas tunggakan); | Sudah ada penambahan item sanksi dan denda dalam Perjanjian. Perlu konfirmasi dengan Tim TLHP BPK-RI | Sudah ditindaklanjuti dengan penambahan item sanksi dan denda pada surat perjanjian |
| | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Belum Memberikan Kontribusi Maksimal | Bapenda | BS | BPK merekomendasikan untuk Segera menetapkan besaran retribusi sewa gedung kantor dan gedung instalasi WTP sesuai aturan yang berlaku; | Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena belum ada penetapan harga besaran retribusi sewa gedung kantor dan gedung instalasi WTP. | Sudah ditindaklanjuti dengan penetapan retribusi sewa gedung kantor dan gedung instalasi WTP, dan telah dilakukan pembayaran |
| 3. | LKPD Tahun 2021 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memutakhirkan Regulasi Pajak Air Permukaan untuk Perusahaan Tambang | Bapenda, Dinas PU dan Biro hukum | BS | Kepala Bapenda, Kepala Dinas PUPR-PERA dan Kepala Biro Hukum supaya berkoordinasi dalam menyelesaikan regulasi Pajak Air Permukaan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara | Belum ada Pergub terkait Pajak Air Permukaan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 | Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi membahas penyesuaian Pajak Air Permukaan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan |

| No. | Jenis Pemeriksaan | Temuan | SKPD | Status Tindak Lanjut | Rekomendasi | Penyebab / Alasan Belum Sesuai | Keterangan |
|-----|-------------------|---|---------|----------------------|--|--|--|
| | | | | | Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan. | | Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 |
| | | Potensi kurang pungut PBBKB atas penyaluran BBM kepada penyedia/penyalur bukan Wapu | Bapenda | BS | Berkoordinasi dengan PT PPN atas potensi kurang pungut PBBKB atas penyaluran BBM kepada penyedia/penyalur bukan WAPU sebesar Rp.717.811.785,00 dan sebanyak 410.000 liter untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan | Belum ada Laporan Hasil Koordinasi Badan pendapatan Daerah dengan PT PPN terkait potensi kurang pungut | Sudah dilakukan koordinasi dengan PT PPN terkait potensi kurang pungut |